

DAFTAR PUSTAKA

“BUKU dan JURNAL”

- Abdullah, S. (2022). *Judicial Activism*. Yogyakarta: Deeppublish.
- AMF, K. H. (2020). *Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 92/Pid.Sus – TPK/2019/JKT.PST*. Jakarta: AMF Law Firm.
- B.N, P. M. (2005). *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*. Bandung: Alumni.
- Dr. Jonaedi Efendi, S. (2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim, Berbasis Nilai Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup Dimasyarakat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Failin. (2017). *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Vol. III). Padang: Cendekia Hukum.
- Hamzah, A. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hapsoro, F. L. (2021). *Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Hakim Kasus Korupsi*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Harahap, M. (2012). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (1997). *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: PT. Citra Aditya Abadi.
- Huda, C. (2006). *Dari Tiada Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- J.J.Bruggink. (1996). *Recht-Reflecties-Grondbegrippen uit de rechttheory*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kuffal, H. (2007). *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press.
- Luqman, L. (1990). *Delik Delik Politik*. Jakarta: Ind-Hill Co.
- Manan, B. (2008). *Menjadi Hakim Yang Baik*. Jakarta: Pusdiklat Teknis Peradilan MA-RI.
- Marlina. (2011). *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama.
- Marpaung, L. (1995). *Proses Penanganan Perkara Pidana* (Vol. II). Jakarta: Sinar Grafika.

- Marpaung, L. (2009). *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mulyadi, L. (2010). *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Palmer, R. E. (2005). *Hermeneutics, Interpretations Theory in Schelrirmacher Dilthey, Heidigger, and Gadamer*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Prof.DR.Satjipto Rahadjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Rahayu, Y. P. (2005). *Requisitor Jaksa Penuntut Umum dan Kepribadian Otoriter Hakim dalam Proses Pemidanaan di Indonesia*. Yogyakarta: Srikandi.
- Saleh, K. W. (1981). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

“PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”

- Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Putusan Pengadilan Agama Kota Depok, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2014/PA.Dpk.
- Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 110 K/AG/2007.
- Putusan Majelis Syari’ah Simpang Tiga Redelog, Putusan Nomor 4/JN/2021/Ms.Str.
- Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 270 PK/Pid.Sus/2020.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
- Putusan Majelis Syari’ah Simpang Tiga Redelog, Putusan Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Str.
- Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Putusan Nomor 349/Pid.B/2021/PN Dps.
- Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Dps.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

“INTERNET”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.go.id, “Reformatio In Peius”.
<https://www.ptun-surabaya.go.id/index.php?view=article&id>. Diakses pada tanggal 28 Maret 2023.

Universitas Ahmad Dahlan. “Konsep Pidana dan Pemidanaan”.
[https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/konsep-pidana-dan-pemidanaan#:~:text=Dalam%20pasal%2051%20dijelaskan%20bahwa,baik%20dan%20berguna%20\(rehabilitasi\)](https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/konsep-pidana-dan-pemidanaan#:~:text=Dalam%20pasal%2051%20dijelaskan%20bahwa,baik%20dan%20berguna%20(rehabilitasi)). Diakses 01 April 2023.

Hukum Online. “Macam Macam Sanksi Pidana Beserta Penjelasan dan Contohnya”.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnya-1t63227a2102445/?page=all>. Diakses 01 April 2023.

Maxime Goodman, Why Judicial Apologies Matter for Procedural Fairness,
<http://proceduralfairnessblog.org/2012/10/23/why-judicial-apologies-matter-for-procedural-fair-ness/#comments>. Diakses 02 Agustus 2023.